

BAB III

DILEMMA LIGA ARAB DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERVENSI MILITER KE SURIAH

Pada bab ketiga ini penulis akan menjelaskan inti dari penelitian yang membahas kebijakan Liga Arab untuk mendukung pihak oposisi Suriah pada tahun 2013. Pada permulaan akan dijelaskan kelompok pro dan kontra didalam keanggotaan Liga Arab terkait intervensi di Suriah, Kemudian penjelasan mengenai dilemma pengambilan keputusan Liga Arab terhadap intervensi ke Suriah.

A. Pro dan Kontra pada internal Liga Arab terkait Intervensi ke Suriah

Pada saat yang sama Liga Arab didominasi oleh kekuatan Sunni Arab yaitu Qatar dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut memberi pengaruh yang besar terhadap Dunia Arab yang sedang terjadi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa konflik yang terjadi pada negara-negara yang dilingkupi oleh Liga Arab dapat mengikutsertakan negara-negara monarkhi Sunni untuk turut andil.

Selain masalah konflik yang kerap menyertai kehidupan politik, Dunia Arab juga mengalami kegalauan terhadap reformasi. Reformasi yang berlangsung selama ini selalu identik dengan revolusi, seperti yang terjadi di Irak, Lebanon, Mesir, dan tentunya Suriah. Di Republik tersebut, para pemimpinnya berupaya untuk menggantikan pola-pola otoritas tradisional yang terjadi pada sistem kerajaan dan nilai-nilai patriakal, kesucian, dan quasi-feudal yang berada di masyarakatnya dengan simbol dan

mitos-mitos modern dan reformis¹. Hal serupa terjadi pada Irak meskipun menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan adanya tekanan asing. Reformasi tidak hanya berupa pergantian sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik atau pemerintahan modern lainnya. Namun, reformasi di Dunia Arab kini telah menjadi isu demokratisasi kehidupan politik dan ekonomi masyarakat.

Hal ini seiring dengan proses mobilisasi sosial yang terjadi di Dunia Arab sendiri dan juga akibat dari gelombang demokratisasi yang melanda semua negara, tidak terkecuali Dunia Arab. Isu demokratisasi telah menjadi perhatian seluruh pemimpin Arab. Dalam KTT Liga Arab yang berlangsung 22 – 25 Mei 2004 di Tunis, Tunisia, ada beberapa agenda penting yaitu isu Palestina, Irak, reformasi di dunia Arab, dan restrukturisasi lembaga Liga Arab dan Demokratisasi di Dunia Arab. Konferensi yang seharusnya dilaksanakan pada 29 – 30 Maret lalu, secara sepihak diundur oleh Tunisia dengan alasan terjadi perbedaan pendapat diantara sesama negara Arab soal isu substansial dan penting menyangkut reformasi di dunia Arab, khususnya masalah demokrasi, hak asasi manusia, pemberdayaan kaum perempuan, dan peran civil society. Sehingga muncul pertanyaan yaitu bagaimanakah sebenarnya kehidupan demokrasi di dunia Arab? dan bagaimana pula peranan yang dijalankan oleh Liga Arab dalam proses demokratisasi di dunia Arab?

Sebelum membahas demokrasi di dunia Arab, maka penulis akan mencoba menetapkan terlebih dahulu titik tolak untuk menentukan standar pengukuran penampilan demokrasi di sana. Tentu saja, yang akan diungkapkan adalah karakter utama demokrasi itu sendiri

¹ “Perkembangan Politik Di Suriah dan Sikap Membeo Liga Arab Tekan Suriah” 17 Oktober 2013, tersedia di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php/content_detail.php?lang=id&id=6120&type=2#.WK5RCjt97IU; diunduh pada 23 Februari 2017

(principal features), karena tidak mungkin mengungkapkan semua elemen demokrasi. Selanjutnya kita akan melihat pula bagaimana regionalisme terjadi dan bagaimana peran organisasi regional bagi negara-negara anggotanya.

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (procedural democracy). Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara dan ungkapan ini biasanya tertuang dalam konstitusi negara. Sedangkan demokrasi dalam artian empirik diperoleh para ilmuwan politik dari pengamatan praktik demokrasi di berbagai negara dan kemudian merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu. Seorang ilmuwan politik yang banyak mengkaji demokrasi secara empirik, G. Bingham Powell, Jr., mempersyaratkan sejumlah kriteria untuk melihat apakah demokrasi betul-betul terwujud dalam suatu negara. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. The legitimacy of the government rests on a claim to represent the desires of its citizens. That is, the claim of the government to obedience to its laws is based on the government's assertion to be doing what they want it to do.
2. The organized arrangement that regulates this bargain of legitimacy is the competitive political election. Leaders are elected at regular intervals, and voters can choose among alternative candidates. In practise at least two political parties that have a change of winning are needed to make such choices meaningful.
3. Most adults can participate in the electoral process, both as voters and as candidates for important political office.
4. Citizens votes are secret and not coerced.

5. Citizens and leaders enjoy basic freedom of speech, press, assembly, and organization. Both established parties and new ones work to gain members and voters.²

Melihat dari aspek-aspek demokrasi yang disampaikan oleh Powell, Jr. nampak adanya semangat untuk meletakkan rakyat dalam kekuasaan yang besar. Dengan mekanisme pemilihan umum, rakyat diberikan hak untuk menjadi pemimpin sekaligus menjadi pemberi mandat kepada pemimpin yang akan terpilih nantinya. Selain itu, penghormatan yang tinggi atas hak-hak dasar rakyat, seperti kebebasan berbicara dan berkumpul menjadi bentuk dari pentingnya posisi rakyat dalam pemerintahan demokrasi. Robert Dahl, seorang ilmuwan politik yang banyak menulis tentang demokrasi, memberikan tujuh indikator bagi demokrasi secara empirik:

1. Control over governmental decisions about policy is constitutionally vested in elected officials.
2. Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free elections in which coercion is quite limited.
3. Practically all adults have the right to vote in these elections.
4. Most adults have the right to run for public offices for which candidates run in these elections. 181
5. Citizens have effectively enforced right to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of government, the prevailing political, economic, and the dominant ideology.
6. They also have access to alternative sources of information that are not monopolized by government or any other single group.

² Sugito, "Liga Arab dan Demokratisasi di Dunia Arab", Jurnal Hubungan Internasional vol 1 no 2/ Oktober 2012, hal 180.

7. Finally they have and effectively enforced right to form and join autonomous associations, including political associations, such as political parties and interest groups, that attempt to influence the government by completing in election and by other peaceful means³.

Dari kedua ilmuwan tersebut, kita mendapatkan beberapa prasyarat suatu sistem politik dikatakan demokratis bila memiliki unsur-unsur akuntabilitas, dimana pemimpin memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada rakyat, rotasi kekuasaan secara periodik dan damai, rekrutmen politik terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan menjadi pemimpin atau pejabat publik, pemilihan umum yang teratur, langsung, jujur, adil, dan bebas, serta adanya penghargaan pemerintah atas hak-hak dasar rakyatnya.

Sistem politik yang demokratis berupaya untuk mencari suatu identitas bersama di sekitar nilai-nilai kemasyarakatan. Sistem tersebut cenderung mempertahankan adanya keanekaragaman dan konflik. Rakyat tetap mempertahankan keterikatan-keterikatan mereka pada berbagai nilai-nilai primordial, sakral, dan personal serta tidak diharapkan untuk memberikan loyalitas mereka yang eksklusif dan menyeluruh kepada pemimpin, partai, atau negara. Tidak ada keortodokan ideologis yang akan menyebut oposisi terhadap pendapat-pendapat yang dominan sebagai pengkhianatan. Rakyat memberikan loyalitas mereka terhadap beberapa sumber⁴. Charles F.

³ ibid

⁴ Andrain, Charles F., , *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (diterjemahkan oleh Luqman Hakim) , Yogyakarta, Tiara Wacana, 1992. Hal 258

Andrain, lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam sistem yang demokratis, muncul rasa saling percaya diantara warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah. Mereka juga menyadari adanya gagasan kesejahteraan umum dan berupaya untuk mewujudkannya. Mereka berperan serta dalam politik tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, namun lebih dari itu juga untuk seluruh masyarakat, termasuk aneka ragam kelompok rasial, etnis, agama, dan regional. Intinya bahwa, identitas demokrasi yang ideal bertumpu pada “kesatuan dalam keanekaragaman”.

Demokrasi di negara-negara Arab belum dapat tumbuh secara baik. Hal ini terutama terjadi di negara-negara monarki, seperti Arab Saudi, Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Jordania. Di negara-negara yang masih mendasarkan legitimasi pada ikatan-ikatan primordial, agama, dan budaya tersebut, sangat rentan terhadap modernisasi. Oleh karenanya di negara-negara monarkhi ini tidak lagi ditemui adanya struktur kekuasaan yang benar-benar tradisional melainkan “kerajaan yang termodernisasi” (modernizing monarchies). Modernisasi di negara-negara monarkhi telah mengakibatkan munculnya “the king’s dilemma”.

Samuel Huntington dalam bukunya “Political Order in Changing Societies” berpendapat bahwa disatu sisi, kekuasaan yang sangat sentralistis diperlukan untuk menjalankan pembaruan-pembaruan sosial, budaya, dan ekonomi, namun disisi lain sentralisasi tersebut telah mempersulit atau bahkan tidak mungkin bagi kerajaan tradisional untuk memperluas basis kekuasaannya dan menerima kekuasaan kelompok-kelompok baru yang dihasilkan

oleh modernisasi⁵. Fenomena inilah yang sampai sekarang ini terjadi di negara-negara monarki Arab.

Di Arab Saudi misalnya, kekuasaan politik sangat terpusat pada raja yang memegang jabatan-jabatan Kepala Dinasti Saudi, Perdana Menteri, Kepala Eksekutif, Imam Keagamaan tertinggi, Komandan Angkatan Bersenjata, dan Kepala Pengadilan⁶. Penguasa di negara ini memiliki kecenderungan kuat membatasi sesempit mungkin berlakunya nilai-nilai liberal, partisipasi politik rakyatnya, dan demokrasi. Guna membendung pengaruh medernisasi, Raja Saudi menempuh strategi akomodasi terhadap berbagai kekuatan tradisional dan berupaya menghindari pembentukan identitas nasional baru.

Mengapa Liga Arabakhirnya mengambil sisi demonstran anti-pemerintah melawan rezim Suriah? Apakah retorika kemanusiaannya hanya menyembunyikan motif sejati dari negara anggota yang paling kuat atau kekhawatiran atas distribusi kekuasaan geopolitik?

Arab Spring telah mengubah asumsi lama tentang stagnasi politik, sikap apatis yang populer, dan kekuatan negara polisi otoriter di Timur Tengah. Mungkin sekilas seperti tidak ada perkembangan yang menjurus pada pandangan diluar wilayah regional Arab, bagaimanapun, hal tersebut lebih dari sekedar keputusan Liga Arab untuk mengingkari kedaulatan pemerintah tiap negara karena mendukung penuh demonstrasi domestik Negara anggotanya atau dalam hal ini adalah Suriah.

⁵ Hudson, Michael C., *Arab Politics: The Search for Legitimacy*, New Haven and London, Yale University Press, 1977. Hal 166.

⁶ Jatmika, Sidik., *AS Penghambat Demokrasi*, Yogyakarta, Bigraf, 2000, hal 72.

Liga Arab telah menanggukkan keanggotaan Suriah pada bulan November⁷, menyusul tindakan ini dianggap sebagai seruan untuk sanksi dan misi pengamatan hak asasi manusia. Liga Arab juga mengusulkan sebuah rencana untuk mengalihkan kekuasaan Suriah yang pada mulanya dipegang oleh rezim Bashar ke pemerintah sementara⁸, proses lobi dianggap gagal karena usulan tersebut ditolak oleh Dewan Keamanan PBB. Sejalan dengan keputusan sebelumnya untuk mendukung intervensi NATO menghadapi Libya, hal tersebut menjadi bukti keberangkatan yang signifikan dari penekanan jangka panjang Liga Arab dalam upaya menghilangkan batas kedaulatan nasional anggotanya.

Fokus yang paling banyak ditelusuri adalah pada ketegangan regional antara Syiah Iran dan negara-negara anggota Sunni yang paling banyak di Liga. Pemerintah Arab, sejak dahulu khawatir dengan kemunculan 'Bulan Sabit Syiah' yang dipimpin oleh Teheran, sangat terlihat untuk cenderung memiliki prospek untuk menggantikan rezim pro-Iran Assad. Selain itu terdapat perpecahan antara anggota Liga Arab sehingga memunculkan blok-blok antara lain: blok yang mendukung persatuan melawan pemberontak di internal Suriah dan blok yang gigih untuk membiarkan rezim Suriah runtuh dengan sendirinya melalui gerakan pemberontak.

Sebagai pertimbangan tambahan juga didalamnya termasuk persaingan kepemimpinan regional dengan Turki, yang telah mengambil sikap

⁷ “Arab League decides to suspend Syria”

<https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/11/201111121342948333.html>; diakses 27 Februari 2018

⁸ “Evolusi Kebijakan Liga Arab Setahun Terakhir”

<http://www.dw.com/id/evolusi-kebijakan-liga-arab-setahun-terakhir/a-15755175>; diakses 27 Februari 2018

keras untuk mendukung pemberontak di kawasan ini dan mendapat perhatian khusus dari masyarakat Arab⁹. Dari keadaan tersebut dapat diambil asumsi bahwa retorika kemanusiaan Liga Arab dianggap menyembunyikan motif sejati dari negara anggotanya yang paling kuat, yaitu secara geopolitik memberikan perhatian terhadap distribusi kekuasaannya di Timur Tengah.

Aktivitas Liga Arab dalam menyamakan realitas bahwa organisasi regional tersebut telah terbagi dalam garis yang jelas. Terlihat bahwa monarki Sunni dan pemerintah pasca revolusi lebih bersemangat untuk menentang rezim Assad daripada pemerintah yang dikuasai Syiah dan kediktatoran sekuler. Ketegangan antara pemerintah Syiah dan pemerintah Sunni di Timur Tengah didorong oleh masalah geopolitik realis dan juga permusuhan lama antara identitas keagamaan oposisi.

Setelah perang antara Iran-Irak, rezim Saddam Hussein dianggap sebagai benteng utama untuk mengangkal radikalisme Syiah dari Iran. Namun ketika rezim Saddam berhasil digulingkan pada tahun 2003, hal tersebut memicu meningkatnya keseimbangan regional terhadap Iran dan membuat banyak negara Arab khawatir tentang kemunculan 'Bulan Sabit Syiah' yang mencakup Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon.

Pada pemungutan suara yang dilakukan pada bulan November untuk menengguhkan Suriah, pemerintah pimpinan Irak pasca Saddam yang dipimpin oleh Hamland menyatakan abstain dan pemerintah koalisi Lebanon-Kristen memilih untuk

⁹ "Turki Dukung Pemberontak Suriah Lakukan 'Operasi Militer Besar' di Idlib" <https://www.matamatapolitik.com/turki-dukung-pemberontak-suriah-lakukan-operasi-militer-besar-di-idlib/>; diakses pada 27 Februari 2018

tidak setuju.¹⁰ Sebaliknya, delapan belas dari sembilan belas pemerintah yang dipimpin Sunni di Liga Arab memilih untuk menanggukhan Suriah, meninggalkan Republik Yaman sebagai satu-satunya suara Sunni yang berbeda pendapat. Dukungan Yaman terhadap rezim Suriah sebenarnya adalah bukti perpecahan kedua dalam dunia otokrasi Arab antara monarki dan diktator sekuler. Perpecahan ini telah muncul sebagai faktor utama dalam *Arab Spring*, karena rezim otoriter di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman dan Suriah - semua republik - telah terbengkalai atau sangat terguncang oleh pemberontakan rakyat. Sementara itu, monarki Arab secara mengejutkan muncul secara adengan tangguh dalam menghadapi kerusuhan regional.

Ketika demonstrasi besar mengancam akan menggulingkan bangsawan di Bahrain, monarki Arab menutup barisan di bawah naungan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan membatalkan demonstrasi tersebut dalam sebuah bingkai multilateral yang dipimpin oleh Arab Saudi. Dengan acuh tak acuh mengabaikan geografi, GCC sejak saat itu mengatakan bahwa Yordania dan Maroko dipastikan menjadi anggota, sebuah langkah yang selanjutnya akan memperkuat identitas organisasi tersebut sebagai klub eksklusif monarki Arab Sunni pro-Barat.

Qatar, yang saat itu memimpin Liga Arab, memimpin usaha untuk mengancam rezim Assad dengan dukungan dari Arab Saudi dan anggota GCC lainnya. Monarki Arab berasumsi bahwa setiap prioritas (preseden) yang ditetapkan oleh keputusan mereka mengenai Libya dan Suriah hanya akan berlaku untuk para diktator yang menguasai republik

¹⁰ “Irak, Libanon Tolak Sanksi Liga Arab Terhadap Suriah”
<http://www.dw.com/id/irak-libanon-tolak-sanksi-liga-arab-terhadap-suriah/a-15560567>; diakses pada 27 Februari 2018.

sekuler, meninggalkan legitimasi kerajaan, emirat, dan kesultanan mereka tanpa dipertanyakan¹¹.

Namun sebaliknya, kediktatoran sekuler Yaman memilih untuk melawan penangguhan Suriah, dengan jelas melihat bahwa keputusan semacam ini akan mempermudah Liga Arab untuk mengambil tindakan di masa depan saat melawan rezimnya yang diperangi. Aljazair, kediktatoran sekuler yang paling menonjol yang belum terpengaruh oleh *Arab Spring* juga telah menyuarakan keprihatinan tentang merongrong kedaulatan nasional di wilayah tersebut. Memahami jenis pemerintahan negara-negara Arab, afiliasi sektarian, dan hubungan geopolitik dengan Suriah sangat penting untuk menjelaskan sikap Liga Arab terhadap rezim Assad.¹²

Norma-norma liberal di wilayah otoriter Persatuan Liga melawan Assad juga muncul dari kepekaan pemerintah anggotanya terhadap norma-norma liberal. Pemberontakan di wilayah tersebut telah menandai naiknya opini publik Arab, terbentuk di lingkungan media yang nyaman dengan wacana hak asasi manusia, demokratisasi, dan solidaritas dengan masyarakat tertindas. Diharapkan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah transisi pasca-revolusioner di Libya atau Tunisia akan mencerminkan sentimen populer, yang membuat mereka berpihak pada demonstran Suriah. Ini adalah pemerintahan otokratis yang masih utuh dari negara-negara Teluk Arab, yang mendorong pemerintah Assad. Mereka juga semakin peka terhadap opini publik karena mereka berusaha meredakan kemarahan dan menopang rezim mereka. Bahkan jika para pemimpin Arab berbalik melawan rezim Suriah adalah usaha sinis untuk menangkis

¹¹ Emile Hokayem, *The Gulf States and Syria*, (United States Institute of Peace, 2011)

¹² *Ibid*

kemarahan rakyat terhadap pemerintah mereka sendiri, keputusan ini tetap memperkuat norma kemanusiaan liberal dan menetapkan preseden melawan represi negara.

Arab Saudi telah berulang kali menyerukan "reformasi yang konkrit dan komprehensif" untuk menangani "situasi menyedihkan hak asasi manusia" di Suriah, termasuk di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan serupa lainnya menunjukkan bahwa rezim yang sangat tidak liberal pun semakin sensitif terhadap masalah hak asasi manusia. Sementara banyak pertimbangan geopolitik telah menentukan negara-negara Arab utama untuk menentang rezim Assad, maka aktivisme akar rumputlah yang benar-benar mendorong Liga Arab untuk mengambil tindakan.

Masyarakat Arab telah muncul sebagai pihak yang luar biasa untuk hak asasi manusia dan pemerintahan yang demokratis di wilayah tersebut dan berdasarkan *Arab Spring*, telah memaksa bahkan pemerintah otokratik yang paling stabil untuk dicatat. Persoalan kontemporer Arab dengan hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke peluncuran saluran televisi satelit al-Jazeera lima belas tahun yang lalu, sebuah proses yang digambarkan dalam pendapat Marc Lynch dari Publik Baru Arab. Al-Jazeera adalah media utama Arab utama yang pertama untuk terlibat secara serius dengan subyek hak asasi manusia, reformasi politik, dan demokrasi pemilihan¹³. Norma hak asasi manusia, yang pertama kali diadvokasi dalam konteks perjuangan Palestina melawan Israel,

¹³“Voices of the New Arab Public: An Interview with Author Marc Lynch It’s not the war in Iraq that’s revolutionizing the Middle East — it’s the media”

<https://www.motherjones.com/politics/2006/01/voices-new-arab-public-interview-author-marc-lynch/>; diakses pada 27 Februari 2018.

menjadi universal untuk memasukkan solidaritas dengan populasi Arab yang tidak puas yang menghadapi kekerasan dari pemerintah mereka sendiri.

Organisasi hak asasi manusia internasional juga telah menjadi bagian dari wacana utama Arab; Al-Jazeera secara online memiliki lebih dari 500 artikel yang ditandai sebagai mengutip LSM terkemuka Human Rights Watch saja. Proses ini telah dipercepat selama *Arab Spring*, didorong oleh meningkatnya relevansi sumber media desentralisasi yang disebar baik secara online maupun melalui media tradisional.

Liputan media yang intens tentang penderitaan orang-orang Suriah menciptakan ruang bagi opini publik Arab untuk berbalik melawan pemerintah Suriah dengan cara yang tidak mungkin terjadi pada tahun 1980an atau 90an. Demonstrasi akar rumput yang tersebar luas dan mendirikan organisasi hak asasi manusia Arab telah memobilisasi publik untuk mendorong negara-negara Arab untuk mengutuk kekerasan rezim Suriah terhadap pemrotes. Kemarahan regional terhadap tindakan keras Suriah menyebabkan demonstrasi di depan kedutaan besar Suriah di Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Sementara itu, para pemrotes di Suriah telah berusaha untuk memobilisasi opini publik Arab dengan mempermalukan pemerintah mereka karena tanggapan mereka yang tidak efektif terhadap krisis tersebut.

Pemerintah Arab yang berkeinginan untuk melakukan protes sangat sensitif terhadap agitasi domestik terhadap rezim Assad. Hal ini telah menyebabkan negara-negara anggota Liga Arab berpihak pada oposisi Suriah, terutama karena kemampuan pemerintah Suriah untuk secara efektif membatalkan perbedaan pendapat internal tampak diragukan.

Kelangsungan hidup rezim adalah kekuatan pendorong yang sangat kuat; menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan sentimen publik mengenai isu-isu non-eksistensial seperti Suriah tampaknya merupakan metode yang masuk akal untuk meredakan kemarahan rakyat di rumah. Meskipun hal ini dapat memperkuat rezim otokratis dalam jangka pendek, lama kelamaan negara-negara ini akan menghadapi demonstrasi masa depan mereka sendiri, dan mereka mungkin menemukan penerapan retorika hak asasi manusia mereka sebelumnya untuk menghantui mereka.

Penyebaran norma-norma hak asasi manusia, media yang mudah diakses, dan publik Arab yang diberdayakan telah secara tidak dapat disimpulkan telah menyempitkan batas-batas perilaku negara yang dapat diterima di dunia Arab, bahkan di negara-negara yang paling otoriter sekalipun. Liga Arab sekarang menemukan dirinya dengan beberapa kartu tersisa untuk dimainkan menyusul veto Rusia dan China dari rencananya di Dewan Keamanan PBB.

Peristiwa di Suriah telah melampaui ancaman sanksi eksternal, karena ekonomi telah merosot di tengah meningkatnya kekerasan. Liga mungkin masih memberikan atau menahan legitimasi terhadap intervensi militer Turki dan / atau barat, memberikan kembali misi pemantauannya, atau mengusulkan rencana lain untuk reformasi atau perubahan rezim di Suriah. Namun, jam tersebut mencekam pada kemampuan Liga untuk menghadirkan wajah yang menyatu ke seluruh dunia, karena Irak akan mengambil alih posisi Qatar sebagai kursi putar Liga selanjutnya dan akan ada perasaan tidak enak untuk memimpin tindakan melawan Assad.

Sikap Liga Arab melawan rezim Suriah adalah sebuah hasil kepentingan geopolitik anggota anggotanya dan meningkatnya arti penting hak asasi manusia; dengan tidak adanya Liga akan terus

berlanjut secara diam-diam mendukung pemerintah Suriah. Tindakan Liga melawan Assad telah memperkuat norma-norma melawan represi negara di Timur Tengah, sebuah proses yang dimulai sebelumnya dengan dukungan intervensi Liga Arab di Libya.

Dua kasus ini, bagaimanapun, tidak memperjuangkan sikap Liga Arab yang konsisten terhadap penindasan oleh negara-negara anggota, yang akan terus menggunakan kekerasan untuk memastikan kelangsungan hidup rezim ketika mereka menganggap perlu. Dimana norma-norma hak asasi manusia dan kepentingan inti nasional bertentangan, seperti dalam kasus pemberontakan mayoritas Syiah melawan monarki Sunni di Bahrain¹⁴, negara-negara anggota Liga Arab akan mendapati diri mereka lebih terpengaruh oleh pertimbangan solidaritas rezim dan kekuatan geopolitik yang keras daripada cita-cita liberal. Meskipun Liga Arab maupun negara anggotanya dapat diharapkan untuk secara konsisten merangkul perlindungan hak asasi manusia atas kedaulatan nasional, pada tahun lalu mereka membuka topik untuk diskusi dan membantu mengubah wilayah dalam proses

B. Dilemma pengambilan keputusan Liga Arab pada Intervensi ke Suriah

Pada sub bab kali ini penulis menyelidiki melalui sudut pandang yang selama ini menjadi acuan bagi Liga Arab. Sudut pandang inilah yang membuat keberadaan Liga Arab dianggap mandul baik di kawasannya sendiri maupun dimata dunia Internasional karena pandangan ini

¹⁴ “Syi’ah Dibalik Pemberontakan di Bahrain” <http://mahad-ib.blogspot.co.id/2011/03/syiah-dibalik-pemberontakan-di-bahrain.html>; diakses 27 Februari 2018

sampai sekarang masih menjadi polemik pada internal Liga Arab. Hubungan-hubungan historis dominasi, ekonomi, politik dan militer tetap menjadi faktor kunci dalam keterbelakangan Liga Arab dalam menghadapi Suriah saat ini. Banyak negara-negara sering disebut sebagai “Dunia Ketiga,” termasuk banyak didalamnya adalah anggota Liga Arab. Kenangan pengalaman ini tetap merupakan bagian penting dari situasi politik saat ini serta sebagai sumber penting dari identitas Pan-Arab dan Pan-Islam.

1. Argumentasi Utama Intervensi Liga Arab

Secara politik kerajaan Saudi sebagai poros utama kekuatan Liga Arab memiliki pandangan yang berseberangan dengan Suriah yang diyakini memiliki kedekatan dengan Iran. Terdapat landasan yang menyebabkan rusaknya hubungan Saudi dan Iran akibat perbedaan antara Sunni dan Syiah.

Arab Saudi memutus hubungan dengan Iran di tengah pertikaian hukuman mati terhadap ulama Syiah terkemuka Arab Saudi, Sheikh Nimr al-Nimr. Kedua kekuatan berada pada posisi yang berseberangan dalam sejumlah konflik kawasan. Saat ini sangat terlihat bahwakedua negara tersebut bersaing satu sama lain.

Iran mengatakan Arab Saudi akan menghadapi "pembalasan Ilahi" terkait eksekusi terhadap ulama terkemuka Syiah tersebut sehingga mengakibatkan konflik diplomatik antar kedua negara yang dimulai dengan diserangnya kedutaan besar Saudi di Teheran oleh pengunjuk rasa yang marah.

Perang Karbala Abad ketujuh dimana cucu Nabi Muhammad, Hussein, terbunuh. Kejadian itu dianggap sebagai permulaan perpecahan Sunni dan Syiah. Kemungkinan faktor paling signifikan di balik persaingan adalah bahwa masing-masing negara memandang dirinya sebagai pemangku agama Islam

dalam versi yang berbeda. Muslim terpisah dalam dua kelompok utama, Sunni dan Syiah. Perpecahan berasal dari pertikaian yang terjadi tidak lama setelah meninggalnya Nabi Muhammad tentang siapa yang seharusnya memimpin umat Muslim. Saudi adalah negara dimana terdapat dua tempat paling suci Islam, Mekkah dan Madinah, sehingga menyatakan diri sebagai 'pemimpin Sunni dunia'. Sementara Iran memiliki penduduk Syiah terbesar dunia dan sejak revolusi Iran pada tahun 1979 menjadi 'pemimpin dunia Syiah'.

Keduanya bersaing untuk mempengaruhi negara-negara tetangganya dan juga Saudi menyematkan kecurigaan tentang pengaruh Iran terhadap kelompok minoritas Syiah di Arab Saudi. Selain itu pengaruh Syiah juga berlangsung di Bahrain, Irak, Lebanon. Program nuklir Iran dan kemungkinan bahwa negara itu pada suatu hari akan memiliki senjata nuklir juga membuat khawatir negara-negara tetangganya, terutama Arab Saudi.

Hubungan Arab Saudi dengan Iran kian memburuk setelah revolusi pimpinan Ayatollah Khomeini. Arab Saudi yang dikuasai seorang raja dan bentuk pemerintahannya adalah Islam konservatif, sementara Iran memiliki bentuk Islam yang lebih revolusioner, ditambah pemimpin revolusi tahun 1979 – Ayatollah Khomeini – memandang monarki tidak sesuai dengan Islam. Agenda berhaluan Islam Syiah radikal diluncurkan pada revolusi 1979 dipandang sebagai suatu penentangan terhadap rezim konservatif Sunni, terutama di kawasan Teluk, dan terdapat kecurigaan mendalam di dunia Arab terkait usaha Iran untuk mengekspor revolusinya ke negara-negara tetangga.

Iran sebagai negara Syiah yang revolusioner sangat mendukung usaha Palestina dalam menentang penjajahan Israel dan memperuncing perbedaan

dengan Liga Arab dengan menuduh negara-negara Liga Arab seperti Arab Saudi, Qatar dan yang lainnya sebagai bangsa yang tidak memperhatikan nasib warga Palestina dan mewakili kepentingan pihak Barat.

Secara historis, Arab Saudi memiliki hubungan dekat dengan Barat yang memasok miliaran dolar persenjataan. Sementara sejak tahun 1979, hubungan Iran dengan Barat sangat menegang dan Barat menerapkan sanksi ekonomi selama bertahun-tahun terhadap Iran terkait apa yang dipandang sebagai usaha Teheran untuk memiliki senjata nuklir.

Iran sama seperti Rusia, keduanya adalah pendukung setia Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dukungan militer dari negara itu dan sekutunya di Lebanon, Hisbullah, dipandang penting untuk mempertahankan kekuasaannya. Sementara Arab Saudi adalah pendukung penting dan penyandang dana kelompok pemberontak Sunni yang menentang pemerintah. Pihak Riyadh juga menjadi tuan rumah dari konferensi yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok pemberontak untuk menentang pemerintahan Presiden Assad yang cenderung mendekati kepada Teheran.

Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya mendukung Saddam Hussein saat terjadinya perang Iran-Irak pada tahun 1980-1988 dan mengalami serangan Iran terhadap kapal-kapalnya. Hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi dibekukan selama tiga tahun setelah perang. Sejak jatuhnya Saddam Hussein, kelompok mayoritas Syiah di Irak memimpin pemerintah dan memelihara hubungan dekat dengan Teheran. Hal ini membuat pengaruh Iran mencapai perbatasan Arab Saudi dan menciptakan persekutuan Syiah Iran, Irak, Suriah dan Lebanon. Baghdad menuduh Arab Saudi mendukung kelompok Sunni radikal dan kekerasan sektarian di Irak.

Arab Saudi berbagi Semenanjung Arab dengan Yaman yang memiliki kelompok minoritas Syiah signifikan, Houthi. Kelompok tersebut memberontak dan mengambil alih sejumlah wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, memaksa pemerintah yang didukung Saudi mengasingkan diri pada permulaan tahun 2015. Negara-negara Arab di Teluk menuduh Iran mendukung Houthi secara keuangan dan militer, meskipun Iran menyangkal hal ini. Keterlibatan Iran di halaman belakang Saudi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di Riyadh dan koalisi pimpinan Saudi terus memerangi para pemberontak.

Pesawat tempur RUSSIAN berada di langit di atas Syria. Selama beberapa minggu terakhir, Kremlin telah meningkatkan kehadirannya, mengirim pesawat terbang dan sistem pertahanan udara yang canggih. Berbicara di Majelis Umum PBB pada hari Senin, Vladimir Putin menyerukan "koalisi internasional yang luas" melawan Negara Islam (IS).

Pada pagi hari tanggal 30 September, parlemen Rusia memberikan izin kepada Putin untuk mengerahkan pasukan ke luar negeri. Pejabat Rusia mengatakan ribuan warga Rusia (kebanyakan berasal dari Kaukasus Utara) yang dilaporkan bertarung memperebutkan ISIS dengan tingkat ancaman keamanan nasional yang serius. Tapi dengan serangan udara pertama mereka di Suriah adalah intervensi pertama mereka di Timur Tengah dalam beberapa dasawarsa. Pasukan Rusia membombardir daerah yang dikelung pemberontak dimana keberadaan ISIS tidak terdeteksi di daerah tersebut.

Bagi Rusia sangat jelas yaitu, sebuah tujuan penting adalah dengan penyatuan sekutu lamanya, rezim Bashar al Assad, yang menguasai 20% negaranya yang setelah empat tahun menginisiasi perang Sipil di Suriah. Lalu mengapa Rusia begitu

ingin mendukung Assad? Hubungan yang sangat dekat antara Rusia dan Suriah membentang selama lebih dari empat dekade. Selama perang dingin, Suriah yang baru merdeka bersekutu dengan blok Timur. Persekutuan tersebut bermula ketika saat masih muda, Hafez al Assad, ayah Bashar, menjalani sekolah penerbangan jet tempur di Uni Soviet. Segera setelah itu Hafiz mengambil alih kekuasaan dalam sebuah kudeta pada tahun 1970, kemudian pembantu senior Assad berkunjung ke Moskow untuk mencari pasokan senjata dan dukungan. Derasnya aliran senjata yang menguntungkan Rusia mulai mengalir ketika Bashar berkuasa, sesaat kemudian Hafiz al Assad memperluas kontrak dengan mengubah Rusia menjadi pemasok terbesar Suriah.

Pemerintah Suriah juga mengizinkan Uni Soviet untuk membangun sebuah stasiun pengisian di pelabuhan Tartus, yang sekarang merupakan satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Timur Tengah dan di laut Mediterania. Suriah juga merupakan basis intelijen militer Rusia yang penting dan posisi mendengarkan. Hubungan budaya meningkatkan hubungan melampaui kepentingan strategis dan komersial. Warga Suriah juga banyak mendapatkan hubungan beasiswa untuk belajar di Uni Soviet. Banyak keluarga campuran Suriah-Rusia yang sudah menikah dan berkembang sehingga semakin mempererat hubungan kedua negara tersebut.

Secara militer pemimpin Liga Arab, Nabil al-Arabi, Kamis (1/12/2011), menolak setiap campur tangan asing di Suriah. Ia menegaskan hal itu saat menghadiri pembicaraan Uni Eropa yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan atas pemerintah di Damaskus karena penindasannya terhadap pembangkang.

Al-Arabi mengatakan bahwa dirinya menolak tuduhan bahwa Liga Arab mengundang campur

tangan setibanya di Brussels untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa, yang memberlakukan sejumlah sanksi baru ekonomi terhadap Damaskus. "Setia keputusan yang diambil oleh Liga Arab menolak campur tangan," katanya, beberapa hari setelah badan pan-Arab tersebut menjatuhkan sanksinya sendiri yang tak pernah dilakukan sebelumnya terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Mouallem, pekan ini menuduh "sebagian anggota Liga Arab" mendorong untuk menginternasionalkan konflik itu.

Para pejabat Uni Eropa mulanya berharap agar bisa menggabungkan kekuatan dengan Liga Arab guna menambah kuat tekanan terhadap Bashar. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerelle, mengatakan, sanksi Liga Arab tersebut "bersejarah" dan Uni Eropa akan membahas bagaimana "kami bisa menyelaraskan tindakan kami". "Saya kira sangat penting bahwa jawaban kami atas penindasan tersebut dan terhadap kejahatan di Suriah adalah jawaban yang bersatu," katanya. Ia menambahkan, pemerintah Eropa juga akan terus berusaha memperoleh resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah.

Para menteri Uni Eropa mengesahkan larangan atas ekspor gas dan peralatan industri minyak ke Suriah, penjualan obligasi Pemerintah Suriah, dan penjualan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memantau internet serta komunikasi telepon, kata sejumlah diplomat. Uni Eropa juga akan dilarang menyediakan pinjaman murah bagi Suriah, kredit dengan suku bunga rendah, dan masa angsuran yang lebih lama ketimbang yang ditawarkan pasar.

Sasarannya ialah untuk membatasi akses pemerintah ke uang kontan. Uni Eropa juga menambahkan 12 orang dan 11 lembaga lagi ke dalam

daftar orang serta perusahaan yang dikenakan pembekuan aset dan larangan bepergian sehubungan dengan penindasan pemerintah atas pemrotes, kata beberapa diplomat. Uni Eropa telah mengesahkan sembilan babak sanksi terhadap Suriah dan menempatkan 74 orang di daftar tersebut, termasuk Bashar al-Assad, memberlakukan embargo senjata dan larangan impor minyak mentah Suriah. PBB menyatakan, kerusuhan di Suriah telah menewaskan lebih dari 3.500 orang sejak pertengahan Maret.

Rezim Assad telah terlibat dalam pertempuran sengit melawan rakyatnya sendiri selama lebih dari dua tahun. Pemimpin Suriah yang diperangi dikutip baru-baru ini mengatakan bahwa "tidak ada solusi yang dapat dicapai dengan teror kecuali dengan memukulnya dengan kepalan tangan besi," yang menggambarkan kepercayaannya pada solusi militer terhadap krisis saat ini.

Sementara Rusia dan Iran (didukung oleh sekutu Syiah mereka, Hizbullah) telah menerima sebagian besar kritik internasional, China telah lolos dari pengawasan yang teliti atas perannya dalam mendukung rezim Assad yang diperangi secara militer, politik dan ekonomi. Sebuah laporan tahun 2011 oleh Badan Penelitian Kongres AS menyoroti peran yang dimainkan China dalam mempersenjatai militer Assad, yang menghasilkan senjata senilai 300 juta dolar dari tahun 2007 sampai 2010. Sebagai bukti dukungan yang terus berlanjut, Februari 2013 melihat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada China Precision Machinery Import and Export Corporation, sebuah perusahaan milik negara, karena diduga melakukan transfer militer ke Suriah yang melanggar undang-undang nonproliferasi.

China cenderung terlihat membiarkan Rusia dan Iran mengambil peran sebagai pendukung utama Assad. Meskipun China kurang jelas dibandingkan

kedua negara lainnya, namun tetap jauh dari netral. Meskipun retorika China mendukung solusi politik, tindakannya menyarankan sebaliknya. Penggunaan selektif China atas kebijakan "noninterferensi" telah membuat mereka (bersama Rusia) memveto tiga resolusi Dewan Keamanan yang didukung oleh Barat yang berusaha membawa Assad ke meja perundingan.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, solusi internasional apapun memerlukan persetujuan China. Selanjutnya, dalam sebuah wawancara yang diberikan kepada Financial Times pada bulan Juni, Kadri Jamil, wakil perdana menteri Suriah untuk ekonomi, membual bahwa China telah bergabung dengan Iran dan Rusia dalam memberikan \$ 500 juta per bulan minyak dan kredit ke Suriah.

Sebagian besar minyak Suriah berada di wilayah utara dan timur laut yang dikepung sebagian besar, dan jaringan jaringan pipa yang menghubungkan sumur dengan pusat populasi rentan terhadap serangan pemberontak. Akibatnya, produksi minyak Siria telah turun sebanyak 95 persen selama konflik yang sedang berlangsung, dan pentingnya bantuan China tidak boleh diremehkan.

Dukungan finansial dan material China melengkapi bantuan Rusia dan Iran dan telah mengizinkan mesin perang Assad agar tetap efektif secara militer. China memiliki banyak kepentingan di Suriah, yang membimbing tindakannya. Selain hubungan ekonomi dan militer yang kuat dengan pemerintahan Assad, yang mendahului krisis saat ini, China mengkhawatirkan radikalisasi populasi Muslim Sunni yang mayoritas, beberapa di antaranya dituduh bepergian ke Suriah untuk mendapatkan pelatihan tempur dengan para pemberontak. Kelangsungan hidup Assad juga terkait dengan pertimbangan geostrategis China mengenai Timur Tengah yang kaya energi, di mana mendukung Assad dipandang sebagai

blok efektif untuk kekuatan Barat di wilayah ini. Terlebih lagi, pemerintah China merasa gugup untuk menciptakan preseden untuk intervensi terhadap hak asasi manusia karena ketidakamanannya sendiri di rumah.

Dengan pemberitaan bahwa pemberontak telah membuka sebuah front baru di dekat kota pelabuhan Latakia, pintu gerbang untuk pasokan asing, tampaknya mereka setidaknya memahami pentingnya bantuan asing kepada Assad. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa lebih dari seratus ribu orang telah terbunuh dan 1,7 juta orang mengungsi dalam krisis Suriah sejauh ini, dan solusi diplomatik terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Sementara Rusia dan Iran telah berperan dalam membiarkan Assad bertahan, masyarakat internasional seharusnya tidak mengabaikan peran penting China.

2. Hasil keputusan terkait wacana intervensi

Keputusan Liga Arab untuk menanggukkan keanggotaan Suriah, menjatuhkan sanksi ekonomi dan mendiskusikan pengaturan periode transisi dengan oposisi, dapat membuka jalan untuk serangan militer di Suriah, serupa dengan yang ada di Libya. Namun, diragukan apakah negara-negara Barat - yang sejauh ini telah menggunakan kurangnya dukungan Arab untuk intervensi untuk membenarkan kelambanan mereka - akan memanfaatkan hal ini. Itu karena, tidak seperti serangan terhadap Libya, serangan terhadap Suriah bisa menimbulkan dampak regional yang dramatis.

Iran dapat memutuskan untuk membuka bagian depannya sendiri dan Hizbullah - saat pemimpin Sheikh Hassan Nasrallah mengancam pekan lalu - dapat melancarkan serangan ke Israel. Langkah militer melawan Suriah juga bisa

menyiratkan niat untuk menyerang Iran, tepat ketika negara-negara Barat ingin menghilangkan ketakutan bahwa orang-orang Iran, Rusia dan China melakukan serangan semacam itu. Ini bukan kali pertama Liga Arab telah menanggukkan sebuah negara anggota. Ini menanggukkan keanggotaan Mesir selama 10 tahun setelah menandatangani perjanjian damai dengan Israel, dan menanggukkan keanggotaan Libya. Tapi keputusan melawan Suriah bukan hanya tindakan hukum. Selain mendelegitimasi rezim Presiden Bashar Assad, ia memberikan legitimasi Arab ke faksi oposisi besar, meski tidak eksklusif, - Dewan Suriah Nasional, didirikan di Istanbul. Dewan tersebut telah diakui untuk pertama kalinya sebagai perwakilan resmi rakyat Suriah.

Dengan demikian, Liga Arab mengasumsikan peran "pembuat rezim," yang bertindak dan bukan hanya merespons. Langkahnya kemungkinan akan membawa Rusia bertemu dengan perwakilan oposisi untuk pertama kalinya juga. Jika pertemuan semacam itu terjadi, akan menandai titik balik dramatis di posisi Rusia; Sampai sekarang sudah berpihak pada Assad.

Irak sejauh ini menahan diri untuk tidak mendukung keputusan Liga tersebut, namun tidak menentanginya seperti yang dilakukan Lebanon dan Yaman. Irak, yang mengkoordinasikan kebijakan luar negerinya dengan Iran, memilih dengan cara yang mencerminkan tekanan Iran. Iran, yang bukan anggota liga, masih terus mendukung Assad.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, pejabat kepemimpinan Iran telah menyerukan untuk menghentikan penindasan brutal di Suriah. Pejabat oposisi di Suriah melaporkan bahwa pejabat Iran telah bertemu dengan anggota oposisi Suriah untuk membahas "masa depan". Se jauh menyangkut Iran, "masa depan" akan mewajibkannya untuk memeriksa hubungannya dengan oposisi, untuk memastikan

keputusan Liga Arab tidak membiarkannya kehilangan sekutu Suriah. Oleh karena itu pentingnya keputusan liga, yang menimbulkan dilema strategis baik ke Barat maupun ke Iran

KTT Arab di Doha pada tahun 2013 berhasil memberi negara-negara anggota hak untuk menawarkan kepada orang-orang Suriah segala cara untuk membela diri termasuk senjata, dalam sebuah resolusi di Suriah. Para pemimpin di pertemuan Doha mengecam pelanggaran rezim Presiden Bashar al-Assad terhadap orang-orang Suriah dan mendesak untuk memberikan bantuan mendesak kepada para pengungsi di Lebanon, Yordania dan Irak.¹⁵

Hasil dari KTT Liga Arab tersebut yaitu adalah memberikan hak kepada anggota Liga Arab untuk memberikan persenjataan kepada kubu oposisi Suriah. Dalam dokumen KTT tersebut yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris oleh *Deutsche Welle* tertulis bahwa “*every state’s right, according to its desire, to present all kinds of measures for self-defense, including military ones, to support the steadfastness of the Syrian people and the Free Army*”, yang bila diartikan bahwa setiap Negara mempunyai hak berdasarkan keinginan untuk memberikan segala jenis alat pertahanan serta persenjataan untuk mendukung rakyat Suriah dan tentara pembebasan Suriah (kubu oposisi).¹⁶

¹⁵“Doha summit gives Arab states ‘right’ to arm Syria rebels”, *Al Arabiya News*, 26 Maret 2013, tersedia di:

<http://english.alarabiya.net/en/2013/03/26/Arab-league-member-states-have-the-right-to-provide-military-assistance-to-Syrian-rebels.html>; diakses pada 27 Februari 2018.

¹⁶ “Arab League agrees members have right to arm Syrian rebels”, *Deutsche Welle*, 26 Maret 2013, tersedia di:

<http://www.dw.com/en/arab-league-agrees-members-have-right-to-arm-syrian-rebels/a-16700903>; diakses pada 27 Februari 2018.

Anggota Liga Arab memastikan hak Suriah untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967. Pemimpin oposisi Suriah mengambil kursi Suriah di badan Arab tersebut dan menuntut agar oposisi Suriah mendapat kursi Suriah di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Para pemimpin di KTT Doha mengatakan bahwa mereka menyambut baik panggilan dialog di Yaman dan Bahrain, mendesak semua negara Arab untuk mendukung mereka. KTT tersebut juga mengecam pendudukan Iran atas kepulauan Uni Emirat Arab: the Tunbs and Abu Musa.

3. Proses pengambilan keputusan

Sebelum KTT Liga Arab ke-24 Liga Arab digelar di Doha, Qatar serta menghasilkan kebijakan untuk mensuplai senjata ke kubu oposisi Suriah, ternyata juga telah ada izin dari Liga Arab mengenai hal serupa. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Liga Arab, Nabil al-Araby pada konferensi pers di Kairo tanggal 6 Maret 2013. Pada kesempatan tersebut al-Araby menyampaikan pesan bahwa anggota Liga Arab diizinkan untuk memberikan bantuan senjata kepada pihak oposisi Suriah. Al-Araby berkilah hal tersebut dilakukan karena upaya-upaya penyelesaian konflik secara politik belum membuahkan hasil.

Dan terungkap bahwa Arab Saudi dan Qatar dalam laporan penelitian yang ditulis oleh Melani De Groof merupakan negara pensuplai senjata terbesar kepada pihak oposisi Suriah. Pada Maret 2013 kedua negara tersebut mengirim 160 Kargo militer dengan berat mencapai 3500 ton pada pihak oposisi Suriah. Dukungan militer tersebut disalurkan ke pihak oposisi melalui Turki dan Yordania. Sedangkan jenis senjata yang dikirim mayoritas adalah jenis “Avtomat Kalashnikova 1947” atau yang disingkat menjadi AK-

47. Begitu pula dengan roket dan granat, ketiganya adalah suplai utama senjata untuk pihak oposisi.

Sebagian dari senjata tersebut dibeli oleh Arab Saudi dan Qatar dari Kroasia dengan bantuan Amerika Serikat dan sekutu di Eropa untuk mendapatkannya. Selain itu juga terdapat senjata yang diselundupkan melalui Libya ke Suriah untuk disalurkan ke kelompok oposisi yang didanai oleh Qatar.¹⁷

Kebijakan yang diambil oleh Liga Arab untuk mendukung kelompok oposisi Suriah diatas tidaklah mendapat persetujuan dari semua anggota. Aljazair dan Irak merupakan anggota yang menentang kebijakan tersebut. Selain itu juga terdapat anggota yang memilih untuk tidak mengambil sikap mengenai kebijakan tersebut, yaitu Lebanon. Namun kebijakan tersebut tetap berlaku walaupun tidak mendapat dukungan dari seluruh anggota.¹⁸

¹⁷ Melanie De Groof, "Arms Transfers to The Syrian Arab Republic: Practice and Legality", *Raport Du Grip*, no: 9, (2013), hal 40.

¹⁸ "Arab League to the Syrian: Fight on", *Alakhbar*, 7 Maret 2013, <http://english.al-akhbar.com/node/15173>; diakses pada 27 Februari 2018.

